

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Proses pertumbuhan di dalam suatu wilayah perkotaan dipengaruhi oleh berbagai faktor baik itu pengaruh yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Iswandi (2018) menyatakan bahwa faktor internal yang mendorong pertumbuhan suatu wilayah adalah pertumbuhan penduduk, ekonomi, dan perdagangan. Selanjutnya pertumbuhan suatu wilayah perkotaan yang pesat dapat menyebabkan perubahan pola penggunaan lahan, di mana ruang terbangun semakin mendominasi dan mendesak ruang-ruang alami untuk beralih fungsi yang di mana dapat mengakibatkan terjadinya fluktuasi daya dukung sumberdaya lahan, sehingga berpotensi menimbulkan terjadinya bencana alam maupun buatan.

UU No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang secara tegas menyatakan bahwa dalam penyusunan rencana tata ruang, terutama untuk kawasan permukiman, harus memperhatikan faktor pendung dan juga faktor pembatas seperti menghindari kawasan rawan bencana. Selanjutnya dikutip dari Iswandi (2018) menyatakan bahwa terdapat dua permasalahan pokok dalam bidang permukiman yang dihadapi Indonesia, yaitu peningkatan kebutuhan permukiman untuk pemenuhan kebutuhan penduduk dan pengelolaan permukiman yang telah terbangun.

Pada umumnya perkotaan di Indonesia banyak mengalami permasalahan penataan ruang, tidak hanya dikarenakan kota tersebut sejak awal telah dibangun dan tumbuh secara alami, akan tetapi kota mengalami pertumbuhan yang lebih pesat, yang biasanya selalu lebih cepat dari konsep tata ruang yang disahkan atau diundangkan dalam suatu peraturan karena cepatnya laju pembangunan diperkotaan. Jumlah penduduk yang bertambah setiap tahunnya akan berakibat pada padatnya penduduk disuatu wilayah yang akan berimbas pada meningkatnya kebutuhan akan tempat tinggal.

Jumlah penduduk yang terus bertambah setiap tahunnya dan kebutuhan akan lahan permukiman yang terus meningkat membuat rentan terjadinya alih fungsi lahan yang tidak sesuai dengan arahan kebijakan RTRW yang telah

ditetapkan. Alih fungsi kawasan yang tidak sesuai dengan peruntukannya dapat menimbulkan permasalahan kota lainnya, seperti pencemaran lingkungan, tidak ada atau minimnya ruang terbuka hijau sebagai daerah resapan hujan dan pengurangan polusi udara, menimbulkan kepadatan bangunan dengan tata letak yang tidak teratur sehingga akses jalan yang sulit dilewati dan permasalahan kota lainnya.

Berdasarkan data yang diperoleh dari badan pusat statistik, laju pertumbuhan penduduk Kota Padang Panjang yaitu 1,44% yang di mana, persentase laju pertumbuhan penduduk Kota Padang Panjang ini lebih besar dibandingkan persentase laju pertumbuhan penduduk Provinsi Sumatera Barat yang di mana hanya sebesar 1,25%. Jumlah penduduk yang terus bertambah membuat permintaan akan lahan untuk perumahan terus meningkat. Hal tersebut terjadi karena permukiman menjadi salah satu kebutuhan dasar manusia yang tidak lepas dari aktivitas ekonomi, industrialisasi dan pembangunan (Mayasari, M;Ritohardoyo, 2012).

Dengan demikian meningkatnya jumlah penduduk maka seiring dengan pertumbuhannya membuat kebutuhan lahan semakin meningkat, jika hal ini tidak diiringi dengan pengawasan terhadap pertumbuhan pembangunan maka penyimpangan bisa saja terjadi. Dengan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“KONSISTENSI RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2012-2032 TERHADAP PEMANFAATAN RUANG PERMUKIMAN”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka, rumusan permasalahan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tingkat konsistensi dan tingkat inkonsistensi dalam penerapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Panjang Tahun 2012-2032 terhadap penggunaan dan atau pemanfaatan ruang perumahan permukiman Kota Padang Panjang,

2. Hambatan apa saja yang ditemukan dalam pengimplementasian RTRW Kota Padang Panjang Tahun 2012-2032 yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang perumahan permukiman.

1.3 Tujuan dan Sasaran Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam pelaksanaan penelitian ini adalah :

1. Mengetahui seberapa besar tingkat konsistensi dan tingkat inkonsistensi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Panjang Tahun 2012-2032 terhadap penggunaan atau pemanfaatan ruang perumahan permukiman Kota Padang Panjang,
2. Mengetahui apa saja hambatan yang ditemukan dalam pengimplementasian RTRW Kota Padang Panjang Tahun 2012-2032 yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang perumahan permukiman,
3. Untuk mengetahui solusi berupa rekomendasi terbaik yang dapat diberikan untuk menjawab pertanyaan atas rumusan permasalahan yang telah disusun.

1.3.2 Sasaran Penelitian

Sasaran yang dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Mengidentifikasi kawasan perumahan Kota Padang Panjang tahun 2011, 2018 dan tahun 2019.
2. Mengidentifikasi serta menganalisis kawasan perumahan yang sesuai (konsisten) dan yang tidak sesuai (inkonsisten) dengan rencana pola ruang kawasan perumahan Kota Padang Panjang.
3. Menganalisis penyebab terjadinya ketidak sesuaian pemanfaatan ruang perumahan permukiman di Kota Padang Panjang.

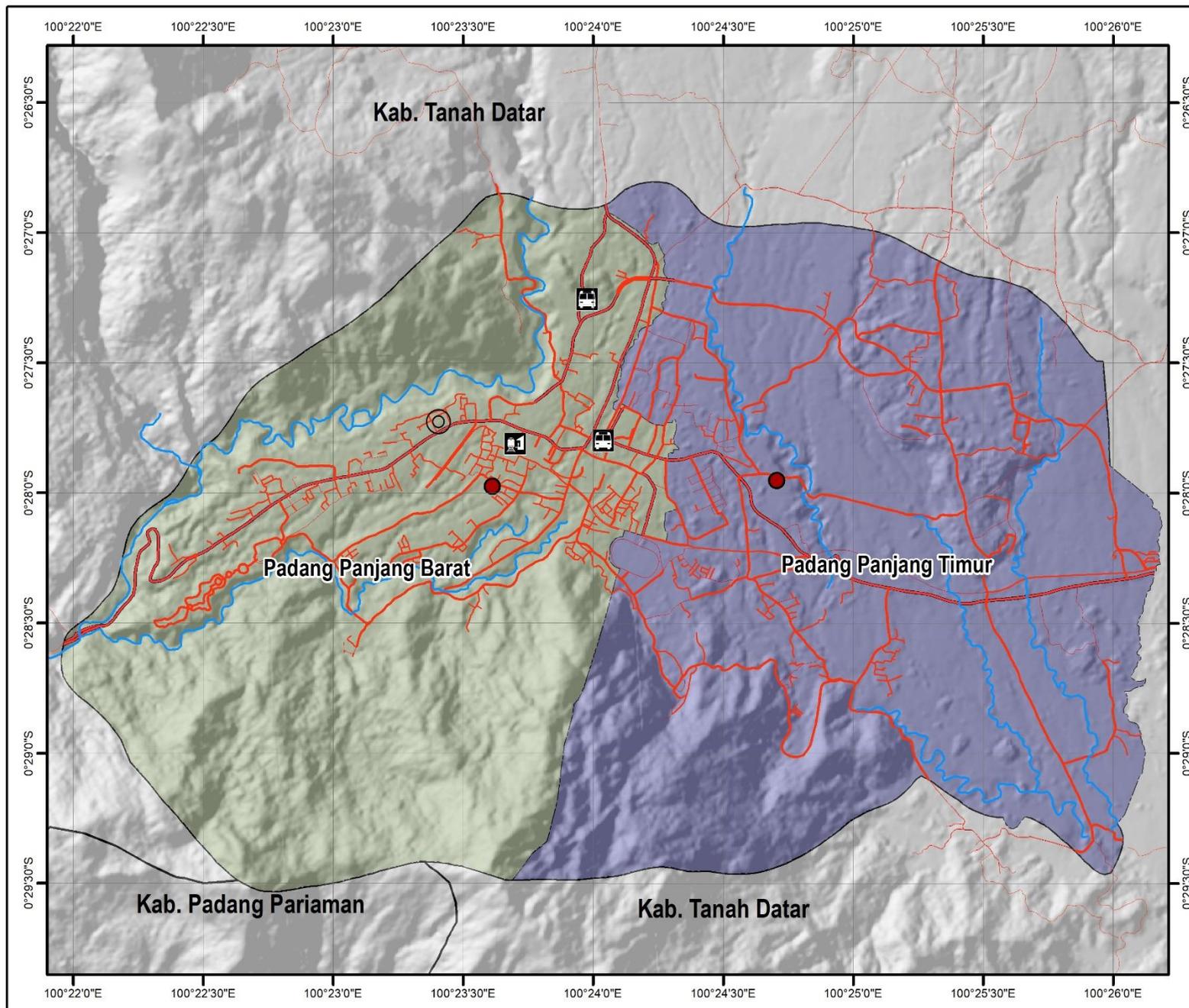
1.4 Ruang Lingkup

1.4.1 Ruang Lingkup Wilayah

Berdasarkan letak geografisnya Kota Padang Panjang memiliki luas lebih kurang 2.917,95 hektar dengan ketinggian wilayah yaitu 750 m dari permukaan air laut. Secara astronomis, Kota Padang Panjang terletak

antara $100^{\circ}20'$ dan $100^{\circ}30'$ Bujur Timur dan $0^{\circ}27'$ dan $0^{\circ}32'$ Lintang Selatan. Berdasarkan posisi geografisnya, Kota Padang Panjang berbatasan langsung dengan Kabupaten Tanah Datar, baik disebelah utara, selatan, barat, maupun timur. Disebelah utara, barat, dan selatan berbatasan dengan Kecamatan X Koto sedangkan di sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Batipuh.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar peta berikut :



Gambar 1 :Peta Administrasi Kawasan Studi Kota Padang Panjang



Skala 1:40,000



Proyeksi : Universal Tranverse Mercator (UTM)
 Sistem Grid : Grid Geografi
 Datum : WGS 84

LEGENDA

Administrasi

- ⊙ Ibu Kota Kota
- Ibu Kota Kecamatan
- - - Batas Kota/Kabupaten
- - - Batas Kecamatan

Kecamatan

- ▣ Padang Panjang Barat
- ▣ Padang Panjang Timur

Prasarana

- 🚉 Stasiun
- 🚏 Terminal

Jaringan Jalan

- Jalan Arteri
- Jalan Kolektor
- Jalan Lingkungan
- Jalan Lokal

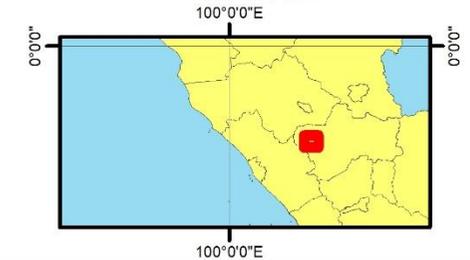
Perairan

- ~ Sungai

Dibuat oleh :

Nama : Meldi Romadhani
 NPM : 1610015311043

Peta Indek



Sumber : RTRW Kota Padang Panjang Tahun 2012-2032



**KONSISTENSI RENCANA TATA RUANG WILAYAH
 KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2012-2032
 TERHADAP PEMANFAATAN RUANG PERMUKIMAN**

**JURUSAN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
 FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
 UNIVERSITAS BUNG HATTA
 2021**

1.4.2 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini membahas terkait dengan bagaimana tingkat konsistensi penerapan RTRW Kota Padang Panjang dengan menilai kesesuaian fungsi peruntukan kawasan perumahan permukiman berdasarkan kebijakan peraturan daerah yaitu RTRW Kota Padang Panjang Tahun 2012-2032 yang terjadi pada kawasan penelitian, yang di mana dilihat dengan menggunakan citra dan menilai kondisi eksisting fungsi penggunaan lahan pada kawasan permukiman yang ada di Kota Padang Panjang serta menilai dengan secara detail terkait bagaimana hambatan dalam pelaksanaan atau penerapan RTRW Kota Padang Panjang.

Batasan-batasan dari lingkup penelitian :

1. Merujuk pada pola ruang RTRW Kota Padang Panjang tahun 2012-2032 yang di mana tingkat ketelitian pola ruang kawasan permukiman sudah detail yang meliputi kawasan perumahan kepadatan tinggi, perumahan kepadatan sedang hingga perumahan kepadatan rendah. Dengan demikian batas penelitian ini terfokus kepada pemanfaatan ruang pada kawasan perumahan sebagai fungsi utama rumah hunian
2. Dalam menentukan tingkat konsistensi dan tingkat inkonsistensi RTRW Kota Padang Panjang dinilai berdasarkan dua alternatif. Alternatif pertama yaitu dinilai berdasarkan kesesuaian rencana pola ruang RTRW terhadap pemanfaatan fungsi kawasan perumahan eksisting tahun 2019. Alternatif kedua yaitu dinilai berdasarkan kesesuaian fisik dasar Kota Padang Panjang terhadap pemanfaatan fungsi kawasan perumahan. Dan untuk menentukan apa saja hambatan dalam mengimplementasikan RTRW dilakukan dengan cara mewawancarai pemangku kepentingan dan juga masyarakat sebagai sumber informasi penelitian.
3. Adapun keluaran dari penelitian ini berupa rekomendasi atau solusi mengenai permasalahan Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang dalam menerapkan atau menjalankan RTRW yang telah disahkan menjadi peraturan daerah.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Metode Pendekatan

Melihat latar belakang yang ada maka dibutuhkan suatu informasi yang dapat menggambarkan kondisi kawasan penelitian dengan baik. Mengacu pada tujuan penelitian, maka pendekatan penelitian yang dilakukan yaitu sifatnya *deskriptif kualitatif* di mana peneliti akan mendeskripsikan tentang kegiatan dan hasil yang akan dicapai nantinya, pendekatan kualitatif sebagai suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari masyarakat dan perilaku yang dapat diamati. Dengan kata lain, penelitian ini disebut penelitian kualitatif dikarenakan merupakan penelitian yang tidak mengadakan perhitungan.

1.5.2 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan survey secara primer maupun sekunder, yang di mana peneliti dapat melakukan pengamatan ataupun observasi secara langsung dilapangan serta mengumpulkan data dari instansi-instansi terkait, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1.1 Metode Pengumpulan Data

<i>Data Yang Diperlukan</i>	Ket. Data	Jenis Data	Sumber Data
<i>Data Kebijakan Terkait</i>	1. RTRW Kota Padang Panjang Tahun 2012-2032, 2. Perda RTRW Kota Padang Panjang No. 2 Tahun 2013, 3. Kebijakan Terkait Lainnya	Sekunder	Dinas PU dan Instansi terkait lainnya.
<i>Data Kondisi Fisik dan Keadaan Eksisting</i>	1. Pola Ruang 2. Penggunaan Lahan dari tahun 2011-terbaru 3. Data Izin Pemanfaatan Ruang	Primer, Sekunder dan Observasi	Dinas PU dan Instansi terkait lainnya.
<i>Data terkait lainnya</i>	1. Isu-isu terkait hambatan dalam implementasi RTRW Kota Padang Panjang Tahun 2012-2032	Observasi dan atau pengamatan langsung	Wawancara dan literatur lainnya.

Sumber : Hasil Analisis, 2020

1.5.3 Metode Analisis

1. Analisis Kebijakan

Dengan mempertimbangkan peraturan dan kebijakan tersebut, dapat dirumuskan dalam RTRW Kota Padang Panjang Tahun 2012-2032 sebagai berikut :

(a) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

Dalam UU No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang disebutkan bahwa penataan ruang merupakan suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Pelaksanaan penataan ruang sendiri merupakan upaya pencapaian tujuan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Dalam undang-undang tersebut disebutkan juga bahwa perencanaan tata ruang merupakan suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang. Struktur ruang yang dimaksud merupakan susunan pusat-pusat kegiatan perkotaan dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Adapun pola ruang merupakan distribusi ataupun sebaran dari peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.

(b) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota

Berdasarkan Permen ART/BPN No. 1 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan RTRW dijelaskan bahwa rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten/Kota merupakan rencana tata ruang yang bersifat umum

dari wilayah kabupaten/kota, yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan, Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional, RTRW Provinsi dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi. Salah satu tujuan dari adanya RTRW ini yaitu mewujudkan pemanfaatan potensi dari sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan daerah provinsi/kabupaten/kota yang bersifat berkelanjutan sesuai dengan kondisi ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, pertahanan keamanan, lingkungan hidup, ilmu pengetahuan dan teknologi.

**(c) Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2013
RTRW Kota Padang Panjang Tahun 2012-2032**

Berdasarkan Perda No. 2 Tahun 2013 Tentang RTRW Kota Padang Panjang dijelaskan bahwa tujuan dari penataan ruang wilayah kota merupakan tujuan yang ditetapkan pemerintah daerah yang merupakan perwujudan dari visi-misi pembangunan jangka panjang kota pada aspek keruangan, yang pada dasarnya mendukung terwujudnya ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berlandaskan pada wawasan nusantara dan ketahanan nasional.

Rencana pola ruang wilayah perkotaan diperuntukkan sebagai rencana distribusi peruntukan ruang wilayah perkotaan yang meliputi peruntukan ruang sebagai fungsi lindung dan budi daya yang dituju sampai dengan akhir masa berlakunya RTRW kota yang memberikan gambaran pemanfaatan ruang wilayah perkotaan hingga 20 (dua puluh) tahun mendatang.

2. Analisis Spasial

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan geospasial yang memanfaatkan aplikasi Sistem Informasi Geografis (SIG). Karakteristik utama dari SIG adalah kemampuan untuk menganalisis sistem seperti analisis statistik dan overlay yang disebut analisis spasial (Fahmi, Sitorus & Fauzi, 2016). Kombinasi ini menggambarkan atribut-

atribut pada berbagai macam fenomena seperti fungsi kawasan, tipe jalan dan sebagainya yang secara bersama-sama dengan informasi seperti apa peruntukan kawasan atau lokasi suatu jalan. Teknik analisis spasial dilakukan dengan cara *overlaying*. *Overlay* atau menumpang tindihkan peta merupakan salah satu fungsi dari aplikasi SIG yang bertujuan untuk menghasilkan data spasial baru dari minimal dua data spasial yang menjadi masukan.

3. Analisis Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Perumahan

Analisis ini digunakan untuk melihat seberapa luas tingkat kesesuaian kawasan perumahan yang ada di Kota Padang Panjang. Untuk mengetahui tingkat kesesuaian kawasan perumahan dilakukan dengan dua alternatif. Alternatif pertama yaitu dengan menilai tingkat kesesuaian kawasan perumahan berdasarkan arahan rencana pola ruang Kota Padang Panjang. Alternatif kedua yaitu dengan menilai tingkat kesesuaian kawasan perumahan berdasarkan pengaruh yang ditimbulkan oleh kawasan perumahan terhadap fisik dasar Kota Padang Panjang.

4. Analisis Indeks Konsistensi dan Inkonsistensi RTRW

Analisis ini digunakan untuk menilai seberapa besar tingkat konsistensi dan inkonsistensi dalam penerapan RTRW pada kawasan penelitian. Untuk mengetahui sesuai atau tidak sesuai perubahan tutupan lahan tersebut, maka digunakan rumus indeks inkonsistensi RTRW dan indeks konsistensi RTRW (Muta'ali (2013) dalam Umar, Iswandi) sebagai berikut: $IIRTRW = PRx / RPKy \dots\dots(pers. 1)$

$IIRTRW$ (Indeks Inkonsistensi RTRW) dihasilkan dari perbandingan antara pemanfaatan ruang (PRx) dengan rencana peruntukan kawasan ($RPKy$). $IKRTRW = 1 - IIRTRW \dots\dots(pers. 2)$

Indeks konsistensi RTRW ($IKRTRW$) dihasilkan dari perbandingan antara rencana tata ruang untuk kawasan tertentu dengan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan peruntukan kawasan tertentu.

1.6 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan sebuah pemahaman yang mendasari pemahaman-pemahaman lainnya, sebuah pemahaman yang paling mendasar dan menjadi pondasi dari setiap pemikiran selanjutnya. Kerangka berpikir ini diperlukan dalam pengembangan atraksi wisata puncak lawang sebagai tahapan dari penelitian ini.

Gambar 2. Kerangka Berpikir Penelitian

Berdasarkan data yang diperoleh dari badan pusat statistik, laju pertumbuhan penduduk Kota Padang Panjang yaitu 1,44% yang di mana, persentase laju pertumbuhan penduduk Kota Padang Panjang ini lebih besar dibandingkan persentase laju pertumbuhan penduduk Provinsi Sumatera Barat yang di mana hanya sebesar 1,25%. Jumlah penduduk yang terus bertambah membuat permintaan akan lahan untuk perumahan terus meningkat. Hal tersebut terjadi karena permukiman menjadi salah satu kebutuhan dasar manusia yang tidak lepas dari aktivitas ekonomi, industrialisasi dan pembangunan (Mayasari, M;Ritohardoyo, 2012).

Latar Belakang

1. Bagaimana tingkat konsistensi dan tingkat inkonsistensi dalam penerapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Panjang Tahun 2012-2032 terhadap penggunaan dan atau pemanfaatan ruang perumahan permukiman Kota Padang Panjang,
2. Hambatan apa saja yang ditemukan dalam pengimplementasian RTRW Kota Padang Panjang Tahun 2012-2032 yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang perumahan permukiman.

Rumusan Masalah

Tujuan

1. Mengetahui seberapa besar tingkat konsistensi dan tingkat inkonsistensi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Panjang Tahun 2012-2032 terhadap penggunaan atau pemanfaatan ruang perumahan permukiman Kota Padang Panjang,
2. Mengetahui apa saja hambatan yang ditemukan dalam pengimplementasian RTRW Kota Padang Panjang Tahun 2012-2032 yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang perumahan permukiman,
3. Untuk mengetahui solusi terbaik apa yang dapat diberikan untuk menjawab pertanyaan atas rumusan permasalahan yang telah disusun.

Sasaran

1. Mengidentifikasi kawasan perumahan Kota Padang Panjang tahun 2011, 2018 dan tahun 2019.
2. Mengidentifikasi serta menganalisis kawasan perumahan yang sesuai (konsisten) dan yang tidak sesuai (inkonsisten) dengan rencana pola ruang kawasan perumahan Kota Padang Panjang.
3. Menganalisis penyebab terjadinya ketidak sesuaian pemanfaatan ruang perumahan permukiman di Kota Padang Panjang.

Tujuan dan Sasaran

Kebijakan

1. RTRW Kota Padang Panjang Tahun 2012-2032
2. Literatur yang terkait dengan tujuan dan sasaran penelitian

Fisik

1. Luas dan letak kawasan penelitian
2. Penggunaan dan pemanfaatan lahan perumahan dari tahun 2011 hingga data terbaru.

Data

Mengidentifikasi kebijakan yang terkait mengenai pemanfaatan ruang perumahan permukiman

Mengidentifikasi spasial dengan memanfaatkan Sistem Informasi Geografis (SIG)

Mengidentifikasi tingkat konsistensi dan inkonsistensi RTRW Kota Padang Panjang terhadap pemanfaatan ruang perumahan permukiman, mencari tahu penyebab atau hambatan dalam penerapan RTRW.

Analisis

- (1) Teridentifikasi fungsi kawasan yang tidak sesuai dengan peruntukannya,
- (2) teridentifikasi tingkat inkonsistensi dalam pengimplementasian RTRW kota Kota Padang Panjang,
- (3) teridentifikasinya hambatan-hambatan dalam pengimplementasian RTRW,
- (4) adanya solusi ataupun rekomendasi atas permasalahan pemanfaatan ruang perumahan.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada tugas akhir ini terdapat beberapa bab dan sub-bab yang di mana diantaranya adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan penelitian, rumusan masalah, tujuan dan sasaran, metodologi penelitian yang didalamnya berisi kerangka berpikir penelitian, pendekatan proses penelitian serta sistematika penulisan laporan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Bab ini berisikan mengenai pengetahuan, kebijakan, landasan teori yang terkait pemanfaatan ruang permukiman, guna lahan, inkonsistensi dan hal-hal lain yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

BAB III Gambaran Umum Kawasan

Bab ini berisikan gambaran umum mengenai pemanfaatan ruang permukiman dan atau penggunaan lahan, jenis tanah dan data lainnya pada kawasan penelitian di Kota Padang Panjang.

BAB IV Analisis dan Pembahasan Kawasan

Bab ini berisikan analisis tingkat inkonsistensi rencana tata ruang wilayah perkotaan pada pemanfaatan ruang permukiman yang dinilai dari kesesuaian fungsi kawasan permukiman dengan peraturan pemerintah daerah yang berlaku.

BAB V Kesimpulan dan Saran

Bab ini berisikan mengenai kesimpulan hasil penelitian dan saran yang akan penulis sampaikan sehubungan dengan penelitian ini agar dapat dimanfaatkan sebagai sumber informasi.